

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: AK.03.01/103/D.III.M.EKON.5/03/2026
--	---

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1: Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang inklusif dan berkelanjutan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Volume Transaksi E-Commerce	Miliar Fraktur Transaksi	2,5	0,6	0,6	100
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA	% (Persentase)	100	25	81,82	327,28
1.3	Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi Pilot Project Gig Economy	% (Persentase)	80	N/A	N/A	100
II	<i>Sasaran Program 2: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	% (Persentase)	85%	25	25	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA	% (Persentase)	80%	20	20	100
III	<i>Sasaran Program 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (Baik)	N/A	N/A	100

IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Minyak dan Gas, Pertambangan dan Petrokimia yang Efektif					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	% (Persentase)	92	25	25	100

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Volume Transaksi *E-Commerce*;
- Persentase Penyelesaian *Legal Drafting* DEFA;
- Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi Pilot Project Gig Economy.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Volume Transaksi E-Commerce

Latar Belakang

Ekonomi digital menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui transformasi digital. Tren ekonomi digital terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dimana salah satu faktor penggerak pertumbuhannya adalah *e-commerce*. Saat ini, sektor *e-commerce* menyumbang sekitar 72% dari total ekonomi digital Indonesia, dan diproyeksikan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya adopsi digital oleh masyarakat.

Pemerintah menempatkan pengembangan ekosistem *e-commerce* sebagai salah satu prioritas dalam transformasi digital nasional. Jumlah volume transaksi *e-commerce* dipilih sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dinilai mampu merepresentasikan tingkat pertumbuhan perdagangan digital dan dampak terhadap perekonomian nasional. Selain itu, indikator ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih tepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 2,5 Miliar Fraktur Transaksi yang didasarkan pada Bank Indonesia. Adapun target dalam tiap triwulan sebesar **0,6** Miliar Fraktur Transaksi.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Jumlah Volume Transaksi *E-Commerce* telah mencapai target dengan terealisasi sebesar **0,6** Miliar Fraktur Transaksi atau mencapai 24% dari target Tahun 2026 yang sebesar 2,5 Miliar Fraktur Transaksi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-1.1 Jumlah Volume Transaksi E- Commerce	Miliar Fraktur Transaksi	0,6	0,6	100 (Memuaskan)
--	--------------------------------	-----	-----	--------------------

*) Nilai realisasi merupakan proyeksi berdasarkan realisasi Triwulan IV Tahun 2025

Jumlah volume transaksi *e-commerce* yang mencapai target merupakan *cascading non direct* dari kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 8% – 9%. Sampai dengan laporan ini disusun, laporan volume transaksi *e-commerce* yang diterbitkan Bank Indonesia masih belum tersedia, sehingga realisasi yang disampaikan masih bersifat proyeksi. Proyeksi disusun berdasarkan data realisasi volume transaksi *e-commerce* tahun 2025 yang bersumber dari Bank Indonesia, dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi digital pada tahun berjalan relatif sama dengan tahun sebelumnya, seiring dengan dampak perlambatan ekonomi yang tengah terjadi. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2026-2030 yang mencakup penguatan regulasi *e-commerce* termasuk Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemberdayaan platform *e-commerce* untuk UMKM, dan lainnya maupun sumber lain yang sejalan dengan RPJMN.

Sampai dengan Triwulan I 2026, koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya berupa koordinasi informal terkait metodologi yang digunakan untuk pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB. Adapun diskusi dilakukan dengan melibatkan Prof. Babacan, dan instansi lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan sebagainya.

Proyeksi jumlah transaksi *e-commerce* pada Triwulan I tahun 2026 diperkirakan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya pada periode yang sama (Triwulan I tahun 2025). Hal ini mengingat Pemerintah berupaya memberikan berbagai insentif seperti momentum kampanye belanja nasional dan global seperti Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS, flash sale dan sebagainya, perluasan akses dan penggunaan digital bagi UMKM dan sebagainya. Oleh karena itu, diprediksikan jumlah transaksi *e-commerce* dapat dipertahankan dan bahkan meningkat sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Volume Transaksi E-Commerce			
No	Rencana Aksi TW	Status	Keterangan

	IV		
1.	Koordinasi, pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> .	Terlaksana	Koordinasi, pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> .

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Membuat timeline target dan rencana kegiatan pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB;
- ❖ Melakukan koordinasi insentif dengan K/L terkait terhadap capaian volume transaksi *e-commerce*;
- ❖ Melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap daftar periksa (checklist) rencana yang telah disusun

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 1.200.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan;

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Saat ini, ketersediaan data transaksi *e-commerce* secara triwulanan masih terbatas dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga, seperti Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, serta instansi lainnya yang memiliki mandat berbeda-beda. Hal ini menyebabkan keterlambatan konsolidasi dan ketidakseragaman metodologi pengumpulan data.

2. Belum adanya metodologi perhitungan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti koordinasi rutin dengan K/L terkait seperti pembentukan forum dialog antar K/L lintas sektor dalam rangka harmonisasi permasalahan yang ada

1.2. Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA

Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat peran Indonesia di tingkat regional, khususnya dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN, Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan ekonomi lintas negara, salah satunya melalui penyelesaian perjanjian *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA). Indonesia memegang peran penting sebagai salah satu penggagas awal dan penggerak utama dalam inisiatif pembentukan DEFA, yang diproyeksikan dapat menambah PDB kawasan ASEAN hingga USD 2 triliun pada tahun 2030, jika diimplementasikan secara komprehensif dan terkoordinasi. Selain itu, diperkirakan juga sebesar 40% pangsa ekonomi digital ASEAN saat ini berasal dari Indonesia.

Mengingat hal tersebut, Persentase Penyelesaian *Legal Drafting DEFA* digunakan untuk menegaskan pentingnya percepatan dan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi digital kawasan, serta perlunya peningkatan kualitas koordinasi kebijakan dan regulasi sebagai fondasi dalam mewujudkan integrasi ekonomi digital ASEAN yang konkret dan berdaya saing.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dengan berdasarkan pada besaran paragraph yang telah disetujui Indonesia dalam DEFA. Adapun target Triwulan I sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, persentase penyelesaian legal drafting DEFA mencapai realisasi sebesar 81,82% atau mencapai 327,28% dari target Tahun 2026 yang sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA	% (Persentase)	25	81,82	327,28 (Memuaskan)

Penyelesaian legal drafting DEFA yang mencapai target merupakan *cascading non direct* dari IKU Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Sampai dengan laporan ini disusun, laporan Penyelesaian legal drafting DEFA telah dikirimkan oleh *ASEAN Secretariat* sebagaimana tampak dalam bukti dukung pada dokumen *ASEAN DEFA Comparative Matrix*. Penyelesaian DEFA menjadi salah satu prioritas Menko Perekonomian guna mempercepat tranformasi digital di Indonesia. Sebagai diketahui, digital ekonomi menjadi salah satu faktor yang

mampu menjadi pendongkrak dalam pertumbuhan PDB Nasional.

Sampai dengan Triwulan I 2026, koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya, dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pertemuan ASEAN DEFA ke-16;

Pertemuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) Putaran ke-16 yang diselenggarakan pada 13–15 Januari 2026 di Bangkok, Thailand, berhasil mencatatkan kemajuan signifikan dalam proses perundingan. Hingga putaran ke-16, telah disepakati 104 dari total 155 paragraf atau setara 67% dari keseluruhan teks perjanjian. Sementara itu, berdasarkan perhitungan *substantial conclusion*, telah tercapai kesepakatan atas 99 dari 130 paragraf atau sekitar 76%, sebelum dilakukan sirkulasi hasil oleh Sekretariat ASEAN. Pada putaran ini juga berhasil disepakati tiga artikel, yaitu *Laws Governing Large Platform Players*, *Paperless Trading*, dan *Scope* pada Bab *General and Security Exceptions*, yang semakin memperkuat progres menuju penyelesaian substansi perjanjian;

Dalam perundingan tersebut, Indonesia secara aktif memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya terkait perlindungan data pribadi, fleksibilitas kebijakan lokalisasi data, pengaturan produk TIK yang menggunakan kriptografi, serta kerja sama kabel bawah laut yang tetap menghormati ketentuan hukum nasional. Sejalan dengan target penandatanganan ASEAN DEFA pada akhir tahun 2026, proses *legal scrubbing* akan mulai dilaksanakan secara paralel dengan putaran perundingan berikutnya guna memastikan penyelesaian teks perjanjian sesuai jadwal yang telah disepakati.

2. Laporan Hasil Pertemuan ASEAN DEFA ke-17;

Pertemuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) Putaran ke-17 yang diselenggarakan secara virtual pada 25–26 Februari 2026 berhasil mencatatkan kemajuan substansial dalam penyelesaian perundingan ASEAN DEFA. Hingga putaran ini, sekitar 75% dari total 155 paragraf perjanjian atau sekitar 116 paragraf telah berhasil disepakati, meningkat signifikan dibandingkan capaian 67% pada putaran ke-16. Sementara itu, untuk ketentuan substantif, tingkat penyelesaian telah mencapai sekitar 85% atau sekitar 110 dari total 130 paragraf berdasarkan laporan Sekretariat ASEAN, menunjukkan bahwa proses perundingan terus bergerak sesuai target penyelesaian menuju tahap *legal scrubbing*;

Selain meningkatnya tingkat kesepakatan secara keseluruhan, Putaran ke-17 juga menghasilkan kemajuan pada sejumlah ketentuan teknis yang semakin mempersempit ruang negosiasi antarnegara anggota. Beberapa paragraf dalam *Paperless Trading* berhasil dibersihkan (*clean text*) setelah tercapainya kesepakatan di antara negara anggota, sementara pembahasan pada isu *Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures for Digital Trade, Customs Duties on Electronic Transmissions*, serta usulan artikel baru dari beberapa negara anggota menunjukkan semakin mengerucutnya opsi teks yang akan menjadi dasar finalisasi perjanjian. Capaian tersebut menjadi landasan penting bagi pembahasan pada Putaran ke-18 yang akan difokuskan pada penyelesaian ketentuan institusional sebagai persiapan memasuki proses *Legal Scrubbing* ASEAN DEFA.

Realisasi pada Triwulan I tahun 2026 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Triwulan I dapat optimal karena dukungan penuh dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital serta kerja sama kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait. Keasdepan Pengembangan Ekonomi Digital akan berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi insentif pada triwulan selanjutnya, dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Atas hal ini, maka target kinerja pada tahun 2026 yang berupa penyelesaian legal draft ASEAN DEFA dapat terselesaikan dengan optimal.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Menghadiri rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-16 dan ke-17 dalam rangka penyampaian posisi Indonesia.	Terlaksana	Rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-16 dilaksanakan pada 13-15 Januari 2026 di Bangkok, Tailan. Rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-17 dilaksanakan pada 25-26 Februari 2026 di Manila, Filipina.
2.	Melaksanakan relay perundingan ASEAN DEFA ke-16 dan ke-17	Terlaksana	- Pelaksanaan Undangan Relay ASEAN DEFA ke-16; - Pelaksanaan Undangan Relay ASEAN DEFA ke-17.
3.	Pelaporan proses legal drafting ASEAN DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.	Terlaksana	- Penyampaian Nota Dinas Nomor PK.PKE/ 11 /D.III.M.EKON.5/01/2026 perihal Laporan Hasil Pertemuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) Putaran ke-16 tanggal 19 Januari 2026; - Penyampaian Nota Dinas Nomor KSE.04.03/44/D.III.M.EKON.5/03/2026 perihal Laporan Hasil Pertemuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) Putaran

			ke-17 tanggal 6 Maret 2026.
--	--	--	-----------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas isu dalam draft ASEAN DEFA yang belum berhasil disepakati;
- ❖ Menghadiri kegiatan pembahasan draft DEFA yang diselenggarakan oleh K/L atau instansi lainnya;
- ❖ Mengikuti *capacity building ASEAN DEFA* untuk memiliki kesepahaman, kesiapan dan kapabilitas negara ASEAN terkait aspek yang dibahas;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring seperti penyiapan kertas posisi yang melibatkan K/L terkait, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 8.000.000,00-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan;

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- a. Tingkat kesiapan negara ASEAN yang beragam terutama bagi negara advance dibidang teknologi seperti Singapura dibandingkan negara lainnya;
- b. Belum adanya kesepakatan antar negara ASEAN terhadap seperti *Cross Border Data Flows, Location of Computing*, dan sebagainya;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti keikutsertaan dalam *capacity building ASEAN DEFA* dan terus melakukan koordinasi lintas sektor serta antar negara yang baik

2

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia (Stranas Ekodig) 2030 sebagai dokumen arah kebijakan dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dalam dokumen tersebut, terdapat 6 pilar utama yakni: 1). Infrastruktur, 2). Sumber Daya Manusia, 3). Iklim Usaha dan Keamanan, 4). Riset, Inovasi dan Pengembangan Usaha, 5). Pendanaan dan Investasi, dan 6). Kebijakan dan Regulasi. Ke-6 pilar tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 61 inisiatif strategis yang mencerminkan komitmen lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi dan progresif.

Sebagai kelanjutan dari penyusunan kebijakan tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital berperan penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Stranas tersebut melalui kegiatan pengawalan, monitoring, dan evaluasi terhadap inisiatif strategis yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fokus pengawalan ini tidak hanya mencakup pelaporan kemajuan implementasi, tetapi juga mencakup koordinasi lintas kementerian/lembaga, identifikasi hambatan, dan perumusan rekomendasi percepatan guna memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam Stranas Ekonomi Digital 2030

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar **85%**, dengan berupa rekomendasi kebijakan yang berhasil dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pimpinan. Adapun target Triwulan I sebesar **25%**.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi telah mencapai target dengan terealisasi sebesar **25%** atau mencapai **100%** dari target Tahun 2026 yang sebesar **85%** dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	%	25	25	100 (Memuaskan)

Hasil capaian telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sesuai dengan target yang ada. Hal ini didukung karena Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi

Digital bertugas mengawal kebijakan yang telah dikeluarkan pada tahun sebelumnya yakni kebijakan dalam inisiatif strategis dalam Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 203. Dari 6 pilar yang ada, ditargetkan terselesaikannya inisiatif strategis dari 3 pilar yang ada.

Sampai dengan Triwulan I 2026, koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya berupa:

1. Koordinasi pembahasan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks Infrastruktur antara lain;
 - a. Rapat Pleno Pelaksana Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) Tahun 2026;
 - b. Rapat Infrastruktur Digital bersama Komdigi;
 - c. Rapat Teknis *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP).
2. Koordinasi Pengembangan SDM di Bidang Ekonomi Digital, dengan hasil;
 - a. Target utama *skillset* pengembangan SDM Pemerintah (didasarkan pada World Economic Survei) berupa 1). AI dan Big Data, 2). Network dan Cybersecurity, dan 3). Data Analytic. Namun, Kemenko Perekonomian juga terbuka dan mendukung pengembangan SDM digital lainnya (online advertisement dll);
 - b. Pelaksanaan Pelatihan Google AI Essentials dan Google Career Certificates.
3. Koordinasi Peta jalan Pengembangan Kecerdasan Buatan dan sinkronisasi dengan rencana pembentukan Satgas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan AI;

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi.	Terlaksana	a. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KSE.04.03/01/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Posisi Indonesia untuk pertemuan ASEAN DEFA putaran ke-16, tanggal 9 Januari 2026;
			b. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/ 05 /D.V.M.EKON.5/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Gig Economy dengan Universitas Trisakti;

			c. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/ 06 /D.V.M.EKON.5/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Gig Economy dengan Universitas Bina Nusantara (BINUS); d. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/ 07 /D.V.M.EKON.5/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Gig Economy dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama); e. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KSE.04.03/09/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan DEFA ke-16, tanggal 8 sd 10 Januari 2026; f. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.01/10/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Diskusi Pembahasan Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB (Komdigi); g. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/16/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Pelaksanaan Warm Up Global Gam Jam 2026 Pendukung Program Gig Economy; h. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.06/18/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB; i. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.01/19/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 30 Januari 2026
--	--	--	---

			perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Pengusulan Infrastruktur Digital sebagai Proyek Strategis Nasional; j. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/20/D.III.M.EKON.5/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Rapat Koordinasi Pengembangan Program Gig Economy dengan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta; k. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PR.03.01/22/D.III.M.EKON.5/2/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Rapat Pembahasan Project Management Tools (Slack); l. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/28/D.III.M.EKON.5/02/2026 tanggal 6 Februari 2026 perihal Permohonan Audiensi terkait Persiapan Pelatihan Gig Economy Huawei; m. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/33/D.III.M.EKON.5/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 perihal Permohonan Audiensi terkait Persiapan Pelatihan Gig Economy Tahun 2026; n. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.04/34/D.III.M.EKON.5/03/2026 tanggal 12 Maret 2026 perihal Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan AI untuk ASN Provinsi Banten; o. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/36/D.III.M.EKON.5/03/2026 tanggal 13 Maret 2026 perihal Undangan Rapat Koordinasi Penjadwalan Pelatihan Gig Economy Jakarta.
--	--	--	---

2.	Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), akses OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya.	Terlaksana	a. Penyampaian Masukan Kuesioner CDEP OECD B/PED.04.01/4/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 5 Januari 2026; b. Penyampaian Masukan Draft Communication Indonesia terkait CDET di Forum WTO dalam Nota Dinas No: R/KSE.05.01/5/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 9 Januari 2026.
3.	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan investasi.	Terlaksana	a. Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: PED.04.06/03/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Laporan Rapat Pembahasan Strategi Penguatan Daya Saing Pelaku Usaha Serta Produk Dan/Atau Jenama Dalam Negeri pada Platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); b. Kunjungan dan Diskusi dengan Huawei Indonesia, mengenai Infrastruktur Digital, tanggal 6 Januari 2026 berdasarkan surat Nomor: B/PED.04.01/3/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 5 Januari 2026; c. Kunjungan Monev ke Huawei Smart Warehouse & 5G Joint pada 22 Januari 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Mengidentifikasi inisiatif strategis yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya;
- ❖ Menghadiri kegiatan terkait pilar-pilar yang ada dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia (Stranas Ekodig) 2030, seperti pembahasan peta jalan pengembangan semikonduktor dan AI;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 3.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan;

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perubahan sebagian besar nomenklatur pada K/L yang menjadi pengampu dalam Buku Putih Stranas Ekonomi Digital 2030, sehingga perlu dilakukan pemetaan kembali sesuai kondisi saat ini;
2. Perbedaan prioritas antar K/L terkait;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti koordinasi rutin dengan K/L terkait seperti pembentukan forum dialog antar K/L lintas sektor dalam rangka harmonisasi permasalahan yang ada

2.2. Persentase

**Efektivitas
Sinkronisasi,
Koordinasi dan
Pengendalian
Kebijakan terkait
Penyiapan Posisi
Runding RI untuk
DEFA**

Latar Belakang

Sebagai bagian dari komitmen regional di bawah kerangka ASEAN, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan melalui penguatan kerja sama di berbagai aspek, seperti arus data lintas batas, e-commerce, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta fasilitasi perdagangan digital.

Peran strategis Indonesia dalam perundingan DEFA menuntut adanya penyiapan posisi nasional yang terkoordinasi, konsisten, dan selaras dengan kepentingan nasional dan kebijakan domestik yang berlaku. Mengingat bahwa isu-isu yang diangkat dalam DEFA bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, maka diperlukan suatu mekanisme sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa posisi runding Indonesia mewakili kondisi yang ada di Indonesia saat ini.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dengan berdasarkan pada besaran paragraf yang telah disetujui Indonesia dan negara lainnya dalam ASEAN DEFA. Adapun target Triwulan I sebesar 20%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi

dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk ASEAN DEFA telah mencapai target dengan terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 yang sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding Indonesia untuk DEFA	% (Persentase)	20	20	100 (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA yang mencapai target merupakan *cascading direct* dari IKU Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan perundingan *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) pada tahun 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan *ASEAN DEFA Negotiating Committee* (DEFA NC) sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian perundingan menuju penandatanganan ASEAN DEFA pada akhir tahun 2026. Sejalan dengan mandat tersebut, Indonesia terus berperan aktif dalam mendorong tercapainya konsensus antarnegara anggota ASEAN, sekaligus memastikan substansi perjanjian tetap mengakomodasi kepentingan nasional. Adapun perkembangan hasil perundingan pada Putaran ke-16 dan Putaran ke-17 menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap penyelesaian substansi perjanjian, sebagaimana diuraikan berikut.

Sampai dengan Triwulan I 2026, koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya, dengan hasil sebagai berikut:

a. Penyusunan kertas posisi Indonesia dalam draft DEFA ke-16;

Hingga berakhirnya ASEAN DEFA NC Putaran ke-16, perundingan telah berhasil menyepakati 104 dari total 155 paragraf atau sekitar 67% dari keseluruhan teks perjanjian. Sementara itu, berdasarkan perhitungan *substantial conclusion*, telah tercapai kesepakatan atas 99 dari 130 paragraf atau sekitar 76% dari keseluruhan ketentuan substantif. Pada putaran ini, negara-negara ASEAN juga berhasil mencapai kesepakatan terhadap tiga artikel, yaitu *Laws Governing Large Platform Players*, *Paperless Trading*, serta *Scope* pada Bab *General and Security Exceptions*. Capaian tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses penyelesaian substansi ASEAN DEFA sekaligus menjadi dasar bagi pembahasan isu-isu strategis yang masih memerlukan konsensus pada putaran selanjutnya.

Dalam proses perundingan tersebut, Indonesia secara konsisten memperjuangkan agar substansi ASEAN DEFA tetap memberikan ruang kebijakan (*policy space*) bagi masing-masing negara anggota dalam mengatur ekonomi digital sesuai kebutuhan dan kerangka hukum nasional. Pada

pembahasan *Security Exceptions* dan *Personal Data Protection Exception*, Indonesia menyatakan dapat menerima usulan yang mengacu pada AANZFTA dengan syarat ketentuan mengenai *Personal Data Protection Exception* tetap dipertahankan. Posisi ini didasarkan pada kebutuhan setiap negara untuk memiliki pengaturan perlindungan data pribadi sesuai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pada isu *Location of Computing Facilities (LCF)* dan *Location of Computing Facilities for Financial Services (LCF for FS)*, Indonesia mempertahankan posisi agar tetap memiliki fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan penempatan *Data Center* dan *Disaster Recovery Centre* di wilayah Indonesia, khususnya untuk menjaga ketahanan sistem digital nasional dan mengantisipasi kondisi krisis yang memerlukan akses terhadap data. Indonesia juga mengusulkan penghapusan ketentuan *LCF for FS* sebagai pasal tersendiri dan mengintegrasikan substansinya ke dalam ketentuan umum *Location of Computing Facilities*, sehingga pengaturan menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi ruang kebijakan nasional.

Dalam pembahasan *Information and Communication Technology Products that Use Cryptography*, Indonesia belum dapat menerima keseluruhan ketentuan mengenai *source code* dan algoritma kriptografi karena belum didukung oleh regulasi nasional yang memadai serta masih berlangsungnya pembahasan kebijakan keamanan siber di tingkat domestik. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar kerja sama di bidang kriptografi lebih diarahkan pada dialog, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarnegara anggota ASEAN tanpa menciptakan kewajiban baru yang berpotensi membatasi kebijakan nasional.

Sementara itu, pada pembahasan *Telecommunication Submarine Cable System Cooperation*, Indonesia mengusulkan penambahan frasa "*in accordance with applicable domestic laws and regulations*" untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama pengembangan dan pemeliharaan kabel bawah laut tetap menghormati ketentuan hukum nasional. Usulan tersebut memperoleh dukungan dari beberapa negara anggota ASEAN dan menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan konektivitas digital kawasan dengan penghormatan terhadap kedaulatan regulasi masing-masing negara.

- b. Penyusunan kertas posisi Indonesia dalam draft DEFA ke-16; Hingga berakhirnya ASEAN DEFA NC Putaran ke-17, perundingan telah berhasil menyepakati sekitar 116 dari total 155 paragraf atau sekitar 75% dari keseluruhan teks perjanjian, meningkat dibandingkan capaian 67% pada putaran sebelumnya. Sementara itu, untuk ketentuan substantif, tingkat penyelesaian telah mencapai sekitar 110 dari total 130 paragraf atau sekitar 85%, berdasarkan laporan Sekretariat ASEAN. Capaian tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan menuju penyelesaian substansi ASEAN DEFA sekaligus menjadi landasan bagi proses finalisasi ketentuan yang masih memerlukan konsensus sebelum memasuki tahapan *legal scrubbing*. Dalam Putaran ke-17, Indonesia tetap mempertahankan posisi untuk memastikan ASEAN DEFA mengakomodasi kepentingan nasional, khususnya dalam aspek perlindungan data, tata kelola data lintas batas, dan kedaulatan digital. Pada pembahasan *Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means (CBTI)*, Indonesia mengusulkan penambahan ketentuan baru pada artikel *Personal Data Protection* sebagai pengganti *footnote* dalam artikel CBTI, sehingga pengaturan mengenai transfer data lintas batas yang mencakup data pribadi tetap selaras dengan kerangka hukum dan regulasi masing-masing negara anggota.

Pada isu *Source Code*, Indonesia bersama Vietnam mempertahankan posisi untuk tetap menggunakan *original text* dan belum dapat menerima usulan Singapura yang dinilai meningkatkan tingkat komitmen secara signifikan, mengingat belum tersedianya regulasi nasional yang mengatur aspek tersebut. Selanjutnya, pada pembahasan *Location of Computing Facilities (LCF)* dan *Location of Computing Facilities for Financial Services (LCF for FS)*, Indonesia tetap memperjuangkan ruang kebijakan untuk mempertahankan kewajiban penempatan *Data Center* dan *Disaster Recovery Centre* di wilayah Indonesia, sekaligus mengusulkan penghapusan pasal *LCF for FS* sebagai ketentuan tersendiri dan mengintegrasikan substansinya ke dalam ketentuan umum *LCF*. Selain itu, pada pembahasan *Information and Communication Technology Products that Use Cryptography*, Indonesia belum dapat menyepakati ketentuan yang diusulkan karena pengaturan mengenai kriptografi masih dalam proses pembahasan di tingkat nasional. Di sisi lain, Indonesia turut berkontribusi dalam pembahasan isu-isu lain, termasuk *Paperless Trading, Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures for Digital Trade, Submarine Cables, dan Customs Duties on Electronic Transmissions*, dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara peningkatan integrasi ekonomi digital ASEAN dan perlindungan terhadap kepentingan serta ruang kebijakan nasional.

Realisasi pada Triwulan I tahun 2026 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Triwulan I dapat berhasil karena dukungan penuh dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dan kerja sama serta kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait. Keasdepan Pengembangan Ekonomi Digital akan berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi insentif pada triwulan selanjutnya, dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Atas hal ini, maka target kinerja pada tahun 2026 yang berupa persentase Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA dapat meraih pencapaian yang optimal dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Monitoring substansi ASEAN-DEFA yang perlu dikoordinasikan	Terlaksana	a. Berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: B/PED.04.01/5/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Permohonan Bantuan Dukungan Pendampingan Delegasi pada Perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) ke-16 di Bangkok Thailand;

2.	Rapat koordinasi penyiapan posisi runding RI untuk ASEAN DEFA ke- 16 dan ke- 17 dengan K/L terkait	Terlaksana	a. Berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.04.03/01/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Posisi Indonesia untuk pertemuan ASEAN DEFA putaran ke-16, tanggal 9 Januari 2026; b. Berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.04.03/11/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Rapat Koordinasi Persiapan DEFA; c. Berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.04.03/12/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Rapat Koordinasi Persiapan DEFA; d. Berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.04.03/25/D.III.M.EKON.5/2/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Undangan DEFA LOCF dan LOCF FS; e. .
3.	Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk ASEAN-DEFA Ke-16 dan Ke-17	Terlaksana	Sebagaimana link yang dikirimkan kepada peserta rapat

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas isu dalam draft ASEAN DEFA yang belum berhasil disepakati;
- ❖ Menghadiri kegiatan pembahasan draft DEFA yang diselenggarakan oleh K/L atau instansi lainnya;
- ❖ Mengikuti *capacity building ASEAN DEFA* untuk memiliki kesepahaman, kesiapan dan kapabilitas negara ASEAN terkait aspek yang dibahas;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti pelaksanaan penyiapan posisi untuk DEFA-15 yang dilakukan secara virtual/daring. Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 3.000.000,00-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan;

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Tingkat kesiapan negara ASEAN yang beragam terutama bagi negara advance dibidang teknologi seperti Singapura dibandingkan negara lainnya;
- Belum adanya kesepakatan antar negara ASEAN terhadap seperti *Cross Border Data Flows, Location of Computing*, dan sebagainya;
- Perbedaan pendapat antar Kementerian/Lembaga pengampu isu;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti keikutsertaan dalam *capacity building* ASEAN DEFA dan terus melakukan koordinasi lintas sektor serta antar negara yang baik

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas, ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator yaitu Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan konektivitas. Pencapaian tersebut dapat dilaksanakan dengan koordinasi dan kolaborasi intensif antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, baik dari sektor publik maupun swasta.

Sebagai lembaga berfungsi sebagai koodinator pada bidang ekonomi digital, maka diperlukan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang efektif, responsif, dan adaptif guna memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan ekonomi digital dapat berjalan secara harmonis, efisien, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan komitmen internasional Indonesia.

Untuk menilai efektivitas peran koordinatif tersebut, diperlukan suatu ukuran kinerja yang dapat merefleksikan persepsi dan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Indeks Kepuasan Layanan KSP di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan aspek kepuasan substansi layanan, yang dilakukan secara semesteran pada Triwulan II dan IV. Adapun survei dilakukan dengan menggunakan skala 1-4, dan disebarkan kepada seluruh stakeholder terkait.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital pada tahun 2026 adalah skala 3 dari 4 (baik) dengan berupa rekomendasi kebijakan yang berhasil dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pimpinan. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital kepada oleh kementerian/lembaga atau instansi terkait mendapatkan hasil yang memuaskan dalam survei yang dilakukan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil dialog kinerja

setiap 6 bulan sekali dan baru dapat diketahui pada akhir Triwulan II dan Triwulan IV. Namun, jika dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada tahun sebelumnya, maka kami memproyeksikan bahwa target dapat terealisasi seluruhnya atau sebesar 100% dari target Triwulan I yang sebesar N/A, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital	%	N/A	N/A	100

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital merupakan *cascading direct* dari Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar N/A dapat terealisasi sesuai yang diharapkan. Hal ini dengan berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan periode sebelumnya (triwulan I 2026). Sehingga secara umum, diproyeksikan bahwa capaian kinerja pada periode berikutnya dapat mencapai N/A atau sebesar 100%.

Adapun pada Triwulan I ini, Keasdepan Pengembangan Ekonomi Digital sudah melakukan berbagai kegiatan seperti:

- c. Identifikasi stakeholder yang akan menjadi tujuan pelaksanaan survei;
- d. Penyiapan daftar pertanyaan dalam survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang pengembangan ekonomi digital;
- e. Penyiapan konsep surat keluar yang akan ditujukan kepada Kementerian/Lembaga maupun instansi atau stakeholder lainnya

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyiapan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital.	Terlaksana	Telah tersusunnya draft konsep Surat Keluar Permohonan Partisipasi Survei Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Semester 2 Tahun 2026 beserta daftar pertanyaan dan stakeholder yang menjadi tujuan survei;

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Menjaga hubungan dan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait;
- ❖ Berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi;
- ❖ Memiliki link daftar hadir beserta nomer telepon peserta yang tersedia secara online dan dapat diakses dimanapun;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan, juga menggunakan link survei tanpa berbayar dalam pelaksanaan layanan kepuasan. Atas hal ini, diproyeksikan efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi yang membutuhkan pertemuan secara fisik.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Lambatnya respon dari responden survei kepuasan;
2. Seringkali responden salah mengartikan bahwasanya survei ditujukan pada level tertentu saja;
3. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja Responden;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti tetap menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan stakeholder tanpa membedakan level jabatan.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas, ditunjukan oleh pencapaian 1 (satu) indikator yaitu Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital pada tahun 2026 sebesar 92%. Target tersebut

dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun Adapun target Triwulan I 2026 adalah sebesar 25%

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 yang sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	%	25	25	100% (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital I merupakan *cascading direct* dari Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang pada Tahun 2026 yang pada Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 92% (kumulatif per tahun).

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target dan kertas kerja rencana aksi RB General yang telah ditetapkan, dengan berbagai kegiatan seperti:

- Telah terselesaikannya penyusunan dan penetapan tim kerja;
- Telah terselesaikannya penyusunan dan penetapan perjanjian kerja, rencana aksi, dan manual IKU;
- Telah terselesaikannya penyusunan laporan kinerja triwulanan;
- Telah terselesaikannya Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan;
- Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.

Sampai dengan Triwulan I Indikator ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada Triwulan I ini, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital diproyeksikan dapat tercapai di akhir Triwulan I 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan penetapan tim kerja	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan Tim Kerja oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dengan SK Deputi sebagai berikut: a. SK Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital No. Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Akselereasi Penyelesaian Perundingan <i>ASEAN Digital Economy Framework Agreement</i>; b. SK Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital No. Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Perumusan Kerangka Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital Terhadap Produk Domestik Bruto.
2.	Penyusunan dan penetapan perjanjian kerja, rencana aksi, dan manual IKU	Terlaksana	a. Telah diselesaikannya penyusunan dan penetapan Perjanjian Kerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Tahun 2026.
3.	Penyusunan laporan kinerja triwulanan	Terlaksana	Telah diselesaikannya laporan kinerja triwulanan berdasarkan Nota Dinas Nomor: AK.03.01/103/D.III.M.EKON.5/03/2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Eselon II Triwulan I Tahun 2026.
4.	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan	Terlaksana	Telah diselesaikannya Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan
5.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	a. Rutin melakukan koordinasi dengan Sekretariat Kemenko Perekonomian maupun Sekretariat Deputi terkait optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI. b. Rutin melakukan koordinasi internal Keasdepan Pengembangan Ekonomi Digital dengan menggunakan Srikandi dalam bentuk Surat Masuk, Surat Keluar, Disposisi maupun Koordinasi.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Memperdalam pemahaman terkait arah dan kebijakan kedepan untuk ekonomi digital sebelum penentuan target kinerja maupun renja atau renstra;
- ❖ Melakukan diskusi dan sinkronisasi RPJMN dan arah kebijakan pimpinan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan dilakukan pada kegiatan yang akan datang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- a. Jangka waktu pengumpulan dokumen target (renja, renstra, dan sebagainya) yang dirasa kurang lama;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti terus melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pejabat lainnya maupun rekan dikantor terkait pentingnya optimalisasi SRIKANDI ataupun penyeragaman target dengan arah kebijakan Pemerintah

Jakarta, 31 Maret 2026

Asisten Deputi

Pengembangan Ekonomi Digital



Theodore Sutarto

NIP. 19811010 2005021001